



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI X DPR RI  
(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI,  
PEMUDA DAN OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF,  
DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

---

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan ke-	: IV (empat)
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Kepala Perpustakaan Nasional RI
Hari/Tanggal	: Kamis, 7 April 2022
Pukul	: 10.00 WIB – Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI (fisik dan virtual menggunakan Zoom)
Pimpinan Rapat	: <b>Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM/Wakil Ketua Komisi X DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP, M.H./Kabagset. Komisi X DPR
Acara	: <b>1. Evaluasi pelaksanaan UU Nomor 13 tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SSKCKR)</b> <b>2. Keputusan RDP/Panja yang belum ditindaklanjuti</b>
Hadir Komisi X DPR RI	: 37 dari 52 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: Muhammad Syarif Bando beserta jajarannya

## **I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 10.15 WIB oleh **Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM/Wakil Ketua Komisi X DPR RI**, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Kepala Perpusnas RI serta menampung pertanyaan, saran dari anggota Komisi X DPR RI.

## **II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

1. Komisi X DPR RI mendorong Perpusnas RI membuat kajian terhadap pelaksanaan UU SSKCKR diantaranya dalam bentuk perbandingan antara sebelum dan sesudah perubahan UU SSKCKR dengan memperhatikan hasil

pemetaan selama 5 tahun (2015-2020) dan perbandingan jumlah judul terbitan dengan jumlah penduduk per provinsi.

2. Komisi X DPR RI mendukung adanya peningkatan anggaran Perpustakaan RI pada APBN TA 2023 dan tahun-tahun mendatang. Selanjutnya, Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan RI untuk merumuskan argumentasi kenaikan anggaran dengan mengkoordinasikan dengan Kemendikbudristek dan Bappenas RI.
3. Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan RI untuk menyusun peta jalan peningkatan literasi Indonesia, dengan melakukan koordinasi dengan K/L terkait antara lain Kemenkominfo RI, Kemendagri RI, Kemendikbudristek RI, dan Kemendes PDTT RI.
4. Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan RI bekerja sama dengan Kemenkominfo RI membuat skema sosialisasi yang masif terkait layanan program digital yang mudah diakses masyarakat, diantaranya materi animasi dan i-pusnas.
5. Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan RI bekerja sama dengan K/L terkait (Kemendes PDTT RI, Kemendikbudristek RI dan Kemendagri RI) untuk memberikan fasilitas dan peluang bagi komunitas literasi di daerah guna melestarikan bahasa dari budaya daerah melalui pendokumentasian serta penerbitan buku atau penyediaan bahan bacaan.
6. Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan RI untuk memberi masukan kepada Kemendikbudristek RI dalam penyusunan revisi UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas khususnya yang berkaitan dengan kurikulum.
7. Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan RI untuk berkoordinasi dengan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) RI agar ada formasi dan afirmasi bagi tenaga pustakawan, baik dipusat maupun di daerah, antara lain dengan mengusulkan pengadaan ASN Pustakawan, baik PNS maupun PPPK.
8. Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan RI untuk dapat membantu para dosen atau peneliti Indonesia dalam memperluas akses jurnal terakreditasi.
9. Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan RI untuk memberi penghargaan bagi penulis di daerah yang telah berperan dalam meningkatkan literasi.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 13.05 WIB

**KEPALA  
PERPUSTAKAAN NASIONAL RI**



**Muhammad Syarif Bando**

**KETUA RAPAT,**



**Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MMA**